



IBADAH UMROH DI MASJIDIL HARAM

Umat Islam berdoa di depan Kabah saat mengikuti ibadah umroh di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Rabu (26/10). Ibadah umroh merupakan ibadah ziarah ke kota Mekkah dengan melaksanakan beberapa amalan mulai dari niat atau ihram, tawaf, sa'i hingga diakhiri dengan memotong rambut atau tahalul.

Korsel, AS dan Jepang Sepakat Tegas Tanggapi Uji Coba Bom Nuklir Korut

Skala respons tak tertandingi akan diperlukan jika Korut melanjutkan uji coba nuklir.

TOKYO(IM)-Korea Selatan (Korsel), Amerika Serikat (AS) dan Jepang telah sepakat menanggapi dengan tegas untuk uji coba nuklir oleh Korea Utara (Korut), pada Kamis (27/10). Washington dan sekutunya yakin Pyongyang akan melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.

Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Koresel Cho Hyun-dong membahas masalah ini dengan rekan dari Jepang Takeo Mori dan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman di Tokyo.

"Kami sepakat bahwa skala respons yang tak tertandingi akan diperlukan jika Korut melanjutkan uji coba nuklir ketujuh," Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman. Sherman mendesak Korut

untuk menahan diri dari provokasi lebih lanjut. Tindakan itu dinilai upaya sembrono dan sangat mengganggu stabilitas kawasan.

"Apa pun yang terjadi di sini, seperti uji coba nuklir Korut berimplikasi pada keamanan seluruh dunia," katanya.

Sherman juga mendesak Korut untuk menahan diri dari provokasi lebih lanjut. Tindakan itu dinilai upaya sembrono dan sangat mengganggu stabilitas kawasan. "Apa pun yang terjadi di sini, seperti uji coba nuklir Korut berimplikasi pada keamanan seluruh dunia," kata Sherman.

AS dan sekutunya telah menawarkan beberapa rincian tentang langkah-langkah baru yang mungkin diambil sebagai tanggapan terhadap dimulainya kembali uji coba nuklir.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel menyatakan, tanggapan diberikan menjadi tindakan eskalasi serius yang akan sangat mengancam stabilitas regional.

Patel menolak merinci bagaimana Washington akan menanggapi dimulainya kembali uji coba nuklir Korut. "Kami terus memiliki alat yang kami miliki untuk meminta pertanggungjawaban DPRK," ujarnya merujuk pada singkatan nama resmi Korut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS ini merujuk pada sanksi sepihak AS dalam menanggapi peluncuran rudal Korut tahun ini. Kemudian Washington pun telah melakukan latihan militer bersama dengan Tokyo dan Seoul yang melibatkan kapal induk untuk pertama kalinya sejak 2017.

Sedangkan Takeo Mori mengatakan, AS, Korsel, dan Jepang telah berkomitmen untuk

lebih memperkuat kemampuan pencegahan dan respons serta kerja sama keamanan trilateral.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Bloomberg, AS dan sekutunya sedang bekerja untuk memperkuat pertahanan. Mereka akan bekerja dengan negara-negara lain, termasuk PBB untuk memberikan tekanan yang tepat pada Korut.

Uji coba nuklir terakhir Korut pun mengkhawatirkan sekutu negara itu, China dan Rusia, dengan mendukung sanksi DK PBB yang diperketat. Hanya saja, Beijing dan Moskow tidak dapat diprediksi dengan mengingatnya hubungan buruk antara Washington karena perang di Ukraina dan ketegangan di Taiwan.

Tanda-tanda ketidakharmonisan dalam masalah Korut muncul pada Mei, ketika China dan Rusia memveto dorongan

pimpinan AS untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korut atas peluncuran misilnya yang berulang. Tindakan ini secara terbuka memecah DK PBB untuk pertama kalinya sejak mulai menghukum Pyongyang pada 2006.

Ketika ditanya tentang komentar pertemuan ketiga negara di Tokyo, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin meminta semua negara untuk mengukir akar penyebab kebuntuan yang sudah berlangsung lama atas program senjata Korut. Dia mendesak agar mengambil langkah-langkah meningkatkan rasa saling percaya dan mengatasi kekhawatiran semua pihak.

Korut telah melakukan uji coba senjata dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini, menembakkan lebih dari dua lusin rudal balistik, termasuk satu yang terbang di atas Jepang. ● tom

PBB Sebut Krisis di Myanmar 'Bencana Besar bagi Rakyat'

NAYPYITAW(IM)-Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, melaporkan kepada Komisi HAM PBB di New York bahwa lebih dari 13,2 juta orang tidak memiliki cukup makanan di Myanmar. Selain itu, 1,3 juta orang harus mengungsi, dan militer Myanmar melanjutkan operasi menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, termasuk pembakaran rumah dan bangunan, dan pembunuhan warga sipil.

Noeleen Heyzer memberikan laporan pertamanya di sidang PBB sejak ia mengunjungi Myanmar pada Agustus lalu dan bertemu dengan kepala juntas militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Dia menerangkan bahwa pertemuan itu "adalah bagian dari upaya yang lebih luas oleh PBB untuk mendukung kembalinya segera pemerintahan sipil."

Dia mengatakan, "ada realitas politik baru di Myanmar: rakyat menuntut perubahan dan tidak mau lagi menerima kekuasaan militer."

Noeleen Heyzer selanjutnya mengatakan, dia membuat enam permintaan selama pertemuan dengan panglima militer Myanmar, termasuk untuk mengakhiri pemboman udara dan pembakaran infrastruktur sipil, memberikan bantuan kemanusiaan tanpa membedakan, membebaskan semua anak dan tahanan politik, melembagakan moratorium eksekusi mati, memastikan kesejahteraan dan memungkinkan pertemuan dengan mantan pemimpin negara yang dipenjara Aung San Suu Kyi dan menciptakan kondisi untuk pemulangan sukarela dan aman bagi lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari tindakan keras militer.

Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021 setelah pemilihan umum November 2020 dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Pihak militer yang kubu politiknya mengalami kekalahan besar menuduh ada kecurangan

dalam pemilu itu.

Kudeta militer itu segera disambut dengan aksi protes besar-besaran, yang kemudian berubah menjadi perlawanan bersenjata pihak oposisi. Para ahli dan pengamat, termasuk pendahulu Noeleen Heyzer, Christine Schraner Burgener, menyebut situasi di Myanmar sebagai "perang saudara".

Sementara itu, Sebagian besar komunitas internasional, termasuk sesama anggota ASEAN, telah menyatakan rasa frustrasi atas garis keras yang diambil para jenderal yang menolak reformasi politik.

Padahal penguasa militer Myanmar telah menyetujui rencana lima poin ASEAN pada April 2021 untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas. Namun junta militer tidak berbuat banyak untuk melaksanakan rencana tersebut.

Rencana perdamaian ASEAN itu menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog di antara semua pihak terkait, mediasi proses dialog oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan melalui saluran ASEAN, dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan pihak terkait.

Heyzer dan utusan khusus ASEAN Prak Sokhonn dari Kamboja telah mengunjungi Myanmar, tetapi keduanya tidak diizinkan untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi.

Heyzer mengatakan kepada Komisi HAM PBB, ada beberapa jalan yang harus ditempuh. "Sementara ada sedikit ruang untuk de-eskalasi kekerasan, ada beberapa cara konkret untuk mengurangi penderitaan rakyat."

Dia mengatakan telah bekerja "sangat erat" dengan utusan ASEAN dan ketua ASEAN, tetapi dia juga mengkritik rancangan lima poin ASEAN, yang tidak menyinggung masalah pengungsi Rohingya, ataupun cara terbaik untuk mengembalikan pemerintahan sipil di Myanmar.

ASEAN menyatakan sangat prihatin dengan eskalasi kekerasan di Myanmar dan menyerukan penghentian segera pertempuran. ● gul

Kota-Kota di Tiongkok Perketat Peraturan Covid-19

BEIJING (IM)- Kota-kota di Tiongkok mulai dari Wuhan sampai Xinjiang melipatgandakan peraturan Covid-19. Kota-kota itu menutup gedung-gedung, pemukiman demi mencegah meluasnya penyebaran virus.

Pada Kamis (27/10) Tiongkok melaporkan 1.000 kasus lebih untuk ketiga kalinya berturut-turut. Angkanya masih terbilang kecil bila dibandingkan puluhan ribu per hari di Shanghai pada awal tahun ini. Tapi cukup mendorong banyak daerah memperketat peraturannya.

Kasus infeksi virus korona Tiongkok masih cukup kecil dibandingkan standar global. Tapi kebijakan ultra-keketat dan disruptif untuk mencegah penyebaran Omicron yang diterapkan tahun ini membebani perekonomian terbesar kedua di dunia itu dan mengguncang pasar finansial.

Kota dengan ekonomi terbesar keempat di Tiongkok

Guangzhou dan ibukota provinsi Guangdong, menutup jalan-jalan dan pemukiman. Pemerintah setempat juga meminta warga untuk tetap tinggal di rumah karena semakin banyak wilayah yang masuk kategori resiko penularan Covid-19 hingga pekan keempat.

Wuhan, kota pertama yang dilanda pandemi Covid-19 pada akhir 2019 lalu, melaporkan sekitar 20 sampai 25 kasus infeksi baru pada pekan ini. Tapi pihak berwenang memerintahkan lebih dari 800 ribu orang untuk tetap tinggal di rumah sampai 30 Oktober.

Berdasarkan foto dan unggahan di media sosial, Wuhan juga menanggukkan penjualan daging babi di sebagian kota. Setelah pihak berwenang mengatakan satu kasus berkaitan dengan rantai pasokan daging babi setempat.

Media sosial juga menunjukkan kelangkaan pangan dan kenaikan harga bahan kebutu-

han pokok di ibukota Provinsi Qinghai, Xining, setelah pihak berwenang menahan pergerakan 2,5 juta warga. Usai angka kasus infeksi naik setelah Hari Libur Nasional pada awal Oktober lalu.

"Untuk meredakan resiko penularan, sejumlah toko sayur dan buah ditutup dan menjalani karantina," kata pemerintah Xining.

Kota-kota besar lainnya di seluruh Tiongkok seperti Zhengzhou, Datong dan Xian menerapkan peraturan baru pekan ini untuk mengendalikan wabah lokal. Di Beijing, taman hiburan Universal Resort ditutup satu pengunjung dinyatakan positif virus korona.

Tiongkok berulang kali berjanji mempertahankan respons tanpa toleransi terhadap Covid-19 dan menerapkan apa yang dikatakan pihak berwenang sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk menahan virus. ● ans

Iran Jatuhkan Sanksi Kepada Uni Eropa

TEHERAN (IM) - Iran pada Rabu (26/10) menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat dan entitas Uni Eropa karena mendukung terorisme, di tengah protes yang sedang berlangsung atas kematian Mahsa Amini setelah ditahan polisi moral di Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran merilis daftar sanksi yang mencakup anggota parlemen Uni Eropa, kelompok advokasi dan media.

Iran menuduh pejabat dan entitas Uni Eropa menyebabkan kerusakan di Iran serta menghasut terorisme, kekerasan dan menyebarkan kebencian. Beberapa organisasi Eropa yang masuk dalam daftar sanksi Iran antara lain, Friends of a Free Iran dari Parlemen Eropa, Komite Internasional Pencarian Keadilan yang berbasis di Brussel, organisasi non pemerintah Stop the Bomb, dan kantor berita Deutsche Welle Jerman.

Sementara individu yang dijatuhkan sanksi diantaranya, co-Chairman Friends of a Free Iran, Javier Zarazlejos, anggota Parlemen Eropa Charlie Weimers, Jan Zahradil, dan Editor surat kabar Bild Jerman, Johannes Boie. Sanksi tersebut termasuk larangan visa kepada individu, penyitaan properti dan

aset mereka di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah Iran.

Sanksi itu ditetapkan seminggu setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap 11 individu dan entitas Iran. Sanksi ini sebagai tanggapan atas kekerasan pihak berwenang Iran terhadap demonstrasi atas kematian Mahsa Amini. Individu dan entitas yang dijatuhkan sanksi oleh Uni Eropa termasuk pejabat tinggi polisi moral Iran, serta Menteri Informasi dan Komunikasi dan lembaga penegak hukum.

"Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mengutuk penggunaan kekuatan yang meluas dan tidak proporsional terhadap pengunjuk rasa damai. Ini tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima," ujar pernyataan Unu Eropa, dilansir Middle East Monitor, Kamis (27/10).

Iran telah diguncang oleh protes yang meluas dalam beberapa pekan terakhir atas kematian Amini. Pemerintah Barat mengutuk Iran karena penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

Pihak berwenang Iran menuduh pemerintah Barat memicu kerusakan di negara itu dengan mencampuri urusan dalam negeri Iran. ● gul

Perempuan Dominasi Parlemen Selandia Baru

WELLINGTON (IM)- Untuk pertama kalinya dalam sejarah Selandia Baru, mayoritas anggota parlemen diduduki oleh perempuan. Soraya Peke-Mason dari Partai Buruh pada Rabu (26/10) dilantik menjadi anggota parlemen menggantikan Trevor Mallard yang diangkat menjadi duta besar Irlandia.

Dengan pengunduran diri Mallard, maka jumlah perempuan di parlemen di Selandia Baru menjadi lebih banyak ketimbang laki-laki. Jumlah perempuan di parlemen tercatat sebanyak 60 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 59 orang.

"Meskipun ini adalah hari yang istimewa bagi saya, saya pikir ini bersejarah bagi Selandia Baru," kata Peke-Mason kepada wartawan.

Menurut Inter-Parliamentary Union, tonggak tersebut menempatkan Selandia Baru menjadi salah satu negara yang tahun ini mengklaim setidaknya 50 persen perwakilan perempuan menduduki parlemen. Negara-negara yang mengklaim hal serupa termasuk Kuba, Meksiko, Nikaragua, Rwanda dan Uni Emirat Arab. Secara global, sekitar 26 persen anggota parlemen adalah perempuan.

Selandia Baru memiliki sejarah representasi perempuan yang kuat di bidang politik. Pada 1893, Selandia Baru menjadi negara pertama yang mengizinkan perempuan untuk memilih. Perdana Menteri Jacinda Ardern saat ini adalah pemimpin wanita ketiga di negara itu. Saat ini perempuan juga memegang sejumlah peran penting lainnya di Selandia Baru, termasuk ketua hakim Mahkamah Agung Selandia Baru dan gubernur jenderal.

"Saya sangat senang putri saya tumbuh di negara, di mana perempuan terwakili secara setara dalam kehidupan publik adalah hal yang normal," kata wakil pemimpin Partai Nasional yang konservatif, Nicola Willis.

Ardern memperingatkan, situasi bagi perempuan di banyak negara lain sedang genting. Jajak pendapat menunjukkan, partai-partai konservatif Selandia Baru, yang saat ini memiliki proporsi perempuan lebih rendah daripada pesaing mereka, siap untuk memperoleh keuntungan selama pemilihan umum tahun depan.

"Saat kita melangkah maju, rasanya seolah-olah kita menyaksikan begitu banyak perempuan mengalami kemunduran yang cepat dalam prosesnya," kata Ardern. ● ans

Pasien Berlatar Imigran Hadapi Diskriminasi di Belanda

ROTTERDAM(IM)- Beberapa profesional kesehatan di Belanda telah melakukan diskriminasi terhadap pasien dengan latar belakang migran. Laporan berjudul "Diskriminasi membuat Anda sakit" oleh Science Institute Statera menunjukkan, pengalaman pasien dengan latar belakang migran termasuk tidak dianggap serius oleh dokter, sikap negatif dari profesional kesehatan, dan kadang-kadang terpapar rasisme atau diskriminasi terbuka.

Banyak dari pasien ini diperlakukan berbeda karena prasangka, kurangnya pemahaman dan komunikasi, atau hambatan bahasa. Untuk melawan diskriminasi dalam perawatan kesehatan, praktik semacam itu perlu dibuktikan dan ditukur, diikuti dengan tindakan yang tepat.

Laporan yang dikutip dari Anadolu Agency menyatakan, pasien mungkin menerima perlakuan dan sikap yang buruk karena latar belakang migran bahkan ketika tidak memiliki hambatan bahasa dan berpendidikan tinggi. Hasil ini didapat dari wawancara terencana dengan enam petugas kesehatan profesional dan kuesioner di antara 183 peserta memberikan data untuk penelitian.

Direktur Science Institute Statera Gokhan Coban mengatakan, lembaganya berujung dengan penelitian ini. Laporan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi terhadap pasien asal migran di sektor kesehatan.

"Setelah diskriminasi oleh kantor pajak Belanda, terlihat adanya diskriminasi di bidang kesehatan atas dasar identitas dan agama," kata Coban.

Menurut Coban, fenomena ini bisa sangat berbahaya bagi kesehatan pasien. Mereka diperlakukan secara berbeda berdasarkan identitas atau agamanya. Coban menegaskan, diskriminasi di Belanda telah menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. "Sektor kesehatan perlu menanggapi masalah ini dengan serius," ujarnya.

Profesional kesehatan dinilai perlu mengenali masalah dan menemukan solusi karena sering kali berpikir tidak bersalah atau tidak menyadari diskriminasi yang dilakukan. "Profesional perawatan kesehatan perlu menerima pelatihan budaya yang lebih baik untuk menyadari perilaku bawah sadar mereka terhadap orang asing," kata Coban. ● gul



EKSPEDISI ANTARTIKA SNOW DRAGON 2

Pemecah es penelitian China Xuelong 2, atau Snow Dragon 2, berangkat untuk ekspedisi Antartika ke-39 negara itu dari Shanghai, Tiongkok, Rabu (26/10).

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. Virendra (Perseroan) yang beralamat di Rukan Sampoerna Square Nomor 21/90, Jatraden, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirukuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 27 Oktober 2022, telah disetujui penurunan modal disetor perseroan yang semula senilai Rp. 5.510.000.000,- (lima miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) menjadi senilai Rp. 1.807.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh juta Rupiah).

Para Pihak yang keberatan atas penurunan modal tersebut harap menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pengumuman ini, dengan tembusan kepada Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Pelayanan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Umum Republik Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan.

Jakarta, 28 Oktober 2022
Direksi
PT. Virendra